

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 32 TAHUN 2026
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN
PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2027

--	--	--



BAPENDA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM

RENCANA KERJA 2027



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2027.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang keuangan, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2027.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, 20 Juli 2026

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Batam,



RAJA AZMANSYAH
NIP.19701120 200003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.1.1 Gambaran Kondisi Perangkat Daerah..... 1

 1.1.2 Definisi Renja..... 2

 1.1.3 Amanat Regulasi..... 3

 1.1.4 Nilai Strategis Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam..... 4

 1.2 Landasan Hukum 5

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 6

 1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8

 2.1 Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029) .. 8

 2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025..... 10

 2.3 Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 10

 2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah 10

 2.3.2 Isu Strategis 11

 2.3.3 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025..... 11

 2.3.4 Kondisi Lingkungan Dinamis 25

 2.4 Telaah Pokok Pikiran DPRD 25

 2.5 Inovasi Peningkatan Pelayanan Publik 25

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 27

 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah..... 27

 3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 27

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 29

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 42

BAB VI PENUTUP 43

 6.1 Catatan Penting 43

 6.2 Kaidah Pelaksanaan..... 43

 6.3 Rencana Tindak Lanjut 44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Kinerja IKU dan IKK 9

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2025 Kota Batam 13

Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Batam
Tahun 2027..... 27

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 31

Tabel 5.1 Kinerja IKU dan IKK Tahun 2025 dan Target Tahun 2027 42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD 3

Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Renja 3

Gambar 1.3 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya..... 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

1.1.1 Gambaran Kondisi Perangkat Daerah

Kota Batam memiliki karakteristik sebagai kawasan strategis nasional yang berbatasan langsung dengan negara tetangga serta berkembang sebagai pusat industri, perdagangan, jasa, investasi, logistik, dan pariwisata. Posisi geografis yang strategis tersebut menjadikan Kota Batam memiliki aktivitas ekonomi yang dinamis dan terus berkembang sehingga memberikan peluang yang besar bagi peningkatan penerimaan daerah. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan dalam pengelolaan pendapatan daerah, antara lain perlunya pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Seiring dengan dinamika perekonomian daerah, perkembangan investasi, perubahan regulasi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dituntut untuk terus melakukan inovasi dalam tata kelola pendapatan daerah. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penguatan digitalisasi layanan perpajakan daerah, pemanfaatan data yang lebih akurat, peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, serta optimalisasi pengawasan terhadap potensi penerimaan daerah.

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan perencanaan yang terarah, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah. Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung kapasitas fiskal daerah, Badan Pendapatan Daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2027 diharapkan tercipta perencanaan tahunan yang berkualitas, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil sehingga

mampu menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Pada akhirnya, Renja ini diharapkan dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, memperkuat kemandirian fiskal Kota Batam, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kota Batam.

1.1.2 Definisi Renja

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

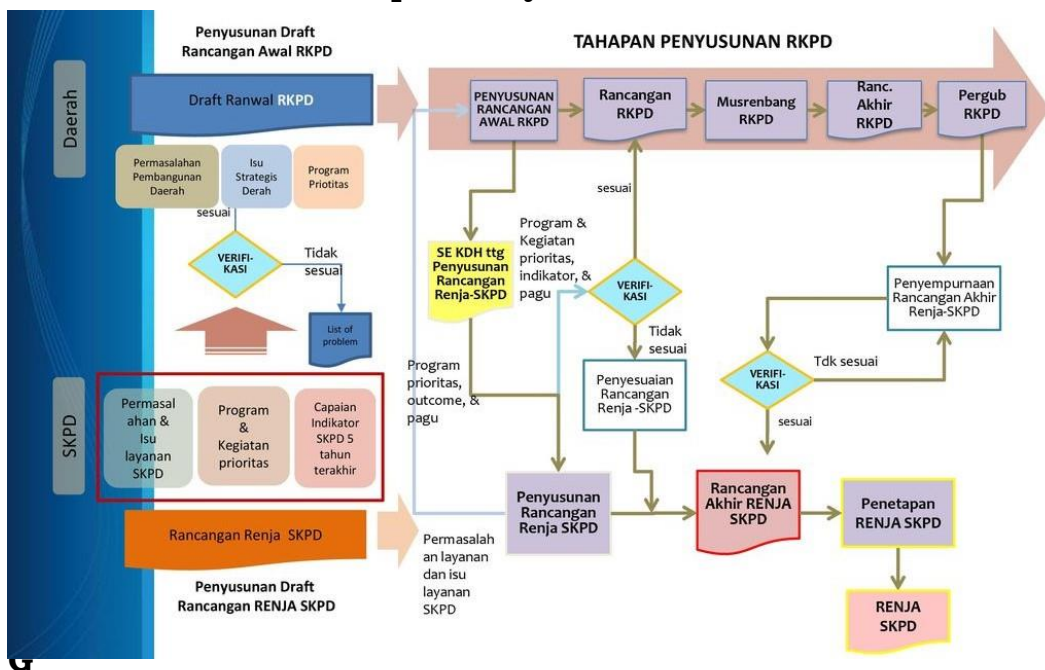
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan keuangan, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

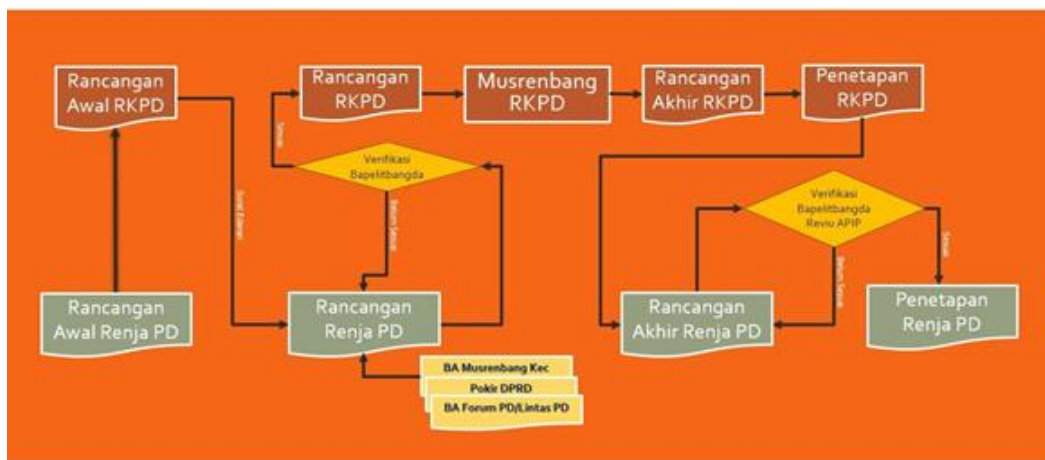
1. Persiapan penyusunan Renja;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja;
3. Penyusunan Rancangan Renja;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja;
6. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RKPD



Gambar 1.2
Tahapan Penyusunan Renja

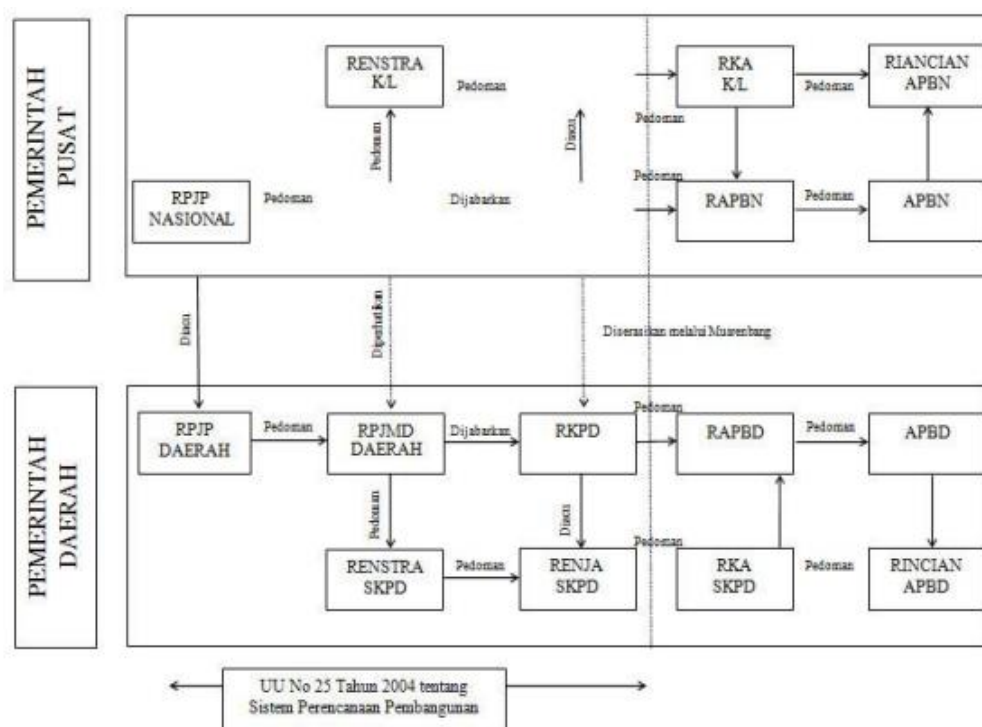


1.1.3 Amanat Regulasi

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.3
Keterkaitan Renja Perangkat Daerah
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.1.4 Nilai Strategis Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam

Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2027 memiliki nilai strategis sebagai:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah sesuai potensi yang dimiliki Kota Batam;
- b. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi;
- c. Memperkuat koordinasi dan sinergi antara Badan Pendapatan Daerah dengan perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam optimalisasi penerimaan daerah;
- d. Menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- e. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah;
- f. Menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja perangkat daerah secara berkala;
- g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui perencanaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil;
- h. Mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Batam.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 22 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Badan Pendapatan Daerah;
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 56 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1626);
18. Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2027, dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2027.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2026 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang (1.1), landasan hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4).

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menguraikan tentang Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (2.1), Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025 (2.2),

Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 (2.3), Telaah Pokok Pikiran DPRD (2.4), dan Inovasi Peningkatan Pelayanan Publik (2.5).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (3.1), Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional (3.2), program dan kegiatan (3.3) yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun 2027 yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2027.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan kinerja IKU dan IKK tahun 2025 serta target tahun 2027.

BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan, catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Analisis kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Evaluasi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Evaluasi Capaian Kinerja IKU dan IKK

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja IKU dan IKK Tahun 2025			Target Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target s/d Tahun Berjalan	
					Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian IKU dan IKK s/d Tahun Berjalan Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
1	Derajat Fiskal Otonomi Daerah		52,83%		55,25%	54,36%	98,39%	54,03%	54,03%	102,28%
2	Tingkat Pertumbuhan PAD;		6,72%		33,01%	27,39%	82,98%	6,03%	6,03%	89,73%
3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		0,768%		0,783%	0,756%	96,56%	0,779%	0,779%	101,43%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batam		90,25		90,13	90,13	100%	90,16	90,16	99,90%
1		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	52,83%		55,25%	54,36%	98,39%	54,03%	54,03%	102,28%

2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tidak termasuk perangkat daerah penyelenggara Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Pelayanan Minimal. Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah lebih difokuskan pada pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pengelolaan pajak daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Meskipun tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi indikator maupun target capaian SPM, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal melalui upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan penerimaan daerah akan memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Kota Batam dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk pemenuhan pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan sistem pengelolaan pendapatan berbasis teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan publik di Kota Batam.

2.3 Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

1. Realisasi penerimaan daerah dari sektor pajak daerah official assessment belum maksimal;
2. Belum optimalnya Realisasi penerimaan daerah dari sektor pajak daerah self assessment;
3. Realisasi piutang pajak daerah yang dapat tertagih masih rendah;
4. Perencanaan pengelolaan pendapatan belum optimal.
5. Efektivitas pelayanan pemerintahan perlu ditingkatkan.

B. Permasalahan Eksternal

1. Perlunya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
2. Perlunya peningkatan upaya dan kontribusi instansi pemungut retribusi daerah dalam pencapaian target;
3. Iklim ekonomi yang kurang stabil;
4. Belum optimalnya penerimaan Lain-lain PAD yang Sah.

2.3.2 Isu Strategis

Berdasarkan analisis kritikal, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam antara lain:

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan optimalisasi pajak terutama dalam hal kegiatan pendataan, penertiban, dan penagihan pajak daerah;
3. Belum optimalnya pemetaan dan penyediaan data dukung dalam menghitung potensi penerimaan retribusi daerah di masing-masing Perangkat Daerah penghasil;
4. Belum terselesaikannya proses perbaikan dan updating data Wajib Pajak PBB-P2;
5. Belum adanya SDM fungsional juru sita;
6. Belum optimalnya penagihan pajak daerah.

2.3.3 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2025 sebagaimana Tabel 2.1 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari target fisik yaitu 100% mencapai 99,98%;
 - b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dari target fisik yaitu 100% mencapai 87,43%;
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dari target fisik yaitu 100% mencapai 99,48%;
 - d. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dari target fisik yaitu 100% mencapai 87,43%.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%;
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%;
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%;
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa belum terdapat program maupun kegiatan yang realisasi kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja masih berada pada tingkat sesuai target atau di bawah target, sehingga pada

periode perencanaan berikutnya diperlukan upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan program, optimalisasi sumber daya, dan penguatan strategi pelaksanaan agar capaian kinerja dapat lebih optimal.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Tidak tercapainya target fisik dari program ini dipengaruhi adanya 1 (satu) unit pengadaan mesin yang tidak dijalankan dengan alasan tidak menemukan spesifikasi produk sesuai dengan kebutuhan.

b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah:

Tidak tercapainya target fisik dari program ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Adanya Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang tidak dilaksanakan karena terbentur dengan regulasi terbaru yang mengharuskan melakukan pembayaran biaya perizinan Penyelenggaraan UGB;
- 2) Terdapat kajian potensi pajak daerah yang ditunda pelaksanaannya menjadi tahun 2026;
- 3) Belum dilaksanakannya Razia penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dijalankan secara bersinergi antara Bapenda Kota Batam dan Bapenda Provinsi Kepulauan Riau karena masih membahas tentang pedoman teknisnya.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah terdapat 4 (empat) indikator yang tidak bisa tercapai. 3 (tiga) diantaranya berkaitan dengan pajak daerah yang langsung diampui oleh Bapenda, sementara 1 (satu) indikator lainnya terkait retribusi daerah yang sepenuhnya dipengaruhi oleh kinerja dari semua perangkat daerah penghasil.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam sampai dengan tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2025 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Badan Pendapatan Daerah Kota Batam

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Bidang Urusan: Keuangan									
5.0 2.0 1	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Nilai SAKIP PD	78,57		71,82	70,97	98,82%	73,57	73,57	93,64%
		2. Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	92,70		91,10	91,46	100,40%	91,50	91,50	98,71%
5.0 2.0 1.2 .01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%		NA	NA	NA	100%	100%	100%
5.0 2.0 1.2. 01. 000 1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		NA	NA	NA	2 Dokumen	1 Dokumen	11,11%
5.0 2.0	Sub Kegiatan : Evaluasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	12 Dokumen		NA	NA	NA	3 Dokumen	1 Dokumen	8,33%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.2.01.0007	Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah								
5.02.01.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.02.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/Bulan		207 Orang/Bulan	206 Orang/Bulan	99,52%	210 Orang/Bulan	210 Orang/Bulan	100%
5.02.01.02.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	40%
5.02.01.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.05.05	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket		3 Paket	3 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	26,66%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0002	Kelengkapannya									
5.02.01.2.05.0011	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang		7 Orang	16 Orang	228,57%	NA	16 Orang	94,12%
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	325 Orang		NA	NA	NA	149 Orang	149 Orang	45,85%
5.02.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.2.06.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%
5.02.01.2.	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46 Paket		8 Paket	8 Paket	100%	8 Paket	16 Paket	34,78%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06.000.2	Perlengkapan Kantor	yang Disediakan								
5.02.01.2.06.000.5	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	8 Paket	40%
5.02.01.2.06.000.6	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%
5.02.01.2.06.000.9	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	40%
5.02.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%		100%	99,57%	99,57%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.0 2.0 1.2. 07. 000 1	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	NA	1 Unit	100%
5.0 2.0 1.2. 07. 000 2	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		NA	NA	NA	9 Unit	9 Unit	225%
5.0 2.0 1.2. 07. 000 5	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	200 Unit		46 Unit	46 Unit	100%	57 Unit	103 Unit	51,50%
5.0 2.0 1.2. 07. 000 6	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	161 Unit		77 Unit	76 Unit	98,70%	137 Unit	213 Unit	132,30%
5.0 2.0 1.2. 07. 000	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		NA	NA	NA	1 Unit	1 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
9	Lainnya									
5.0 2.0 1.2 .08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.0 2.0 1.2. 08. 000 2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	40%
5.0 2.0 1.2. 08. 000 4	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	40%
5.0 2.0 1.2 .09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.0 2.0	Sub Kegiatan : Penyediaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	1 Unit		NA	NA	NA	1 Unit	1 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.2.09.0001	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
5.02.01.2.09.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit		23 Unit	23 Unit	100%	24 Unit	24 Unit	92,31%
5.02.01.2.09.0006	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	432 Unit		275 Unit	275 Unit	100%	275 Unit	275 Unit	63,66%
5.02.01.2.09.	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	NA	1 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0010	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi								
5.02.01	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih;	10%		10%	12,17%	121,70%	10%	10%	100%
		2. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target;	98%		98%	96,48%	98,45%	98%	98%	100%
		3. Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah;	10,76%		25,98%	1,99%	7,66%	4,96%	4,96%	46,09%
		4. Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assessment;	6,50%		16,73%	13,24%	79,14%	6.50%	6.50%	100%
		5. Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assessment.	6,50%		16,09%	12,15%	75,51%	6.50%	6.50%	100%
5.02.04.2	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan	1. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah Official	2,85%		2,76%	12,13%	433,49%	2,76%	2,76%	96,84%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
.01	Daerah	Assessment;								
		2. Rasio Capaian Penagihan Piutang Pajak Daerah;	100%		100%	121,70%	121,70%	100%	100%	100%
		3. Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah Yang Dihasilkan;	18 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	6 Dokumen	33,33%
		4. Persentase Koordinasi dengan OPD Penghasil Retribusi;	100%		NA	NA	NA	100%	100%	100%
		5. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah Self Assessment.	1,05%		0,77%	3,55%	461,04%	0,90%	0,90%	85,71%
5.0 2.0 4.2. 01. 000 1	Sub Kegiatan : Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen		NA	NA	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
5.0 2.0	Sub Kegiatan : Analisa dan	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.2.01.0002	Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah								
5.02.04.2.01.0003	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	58 Laporan		8 Laporan	10 Laporan	125%	7 Laporan	17 Laporan	29,31%
5.02.04.2.01.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.000 Unit		602 Unit	345 Unit	57,31%	502 Unit	502 Unit	50,20%
5.02.04.2.01.0005	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	40%
5.02.04.2.01.000	Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	50 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	20 Laporan	40%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6										
5.0 2.0 4.2. 01. 000 7	Sub Kegiatan : Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	40.000 Objek Pajak		NA	NA	NA	10.000 Obyek Pajak	10.000 Obyek Pajak	25%
5.0 2.0 4.2. 01. 000 9	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan		9 Layanan	9 Layanan	100%	9 Layanan	9 Layanan	100%
5.0 2.0 4.2. 01. 001 0	Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	85 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	100%	17 Dokumen	34 Dokumen	40%
5.0 2.0 4.2. 01. 001	Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	80 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	100%	17 Dokumen	34 Dokumen	42,50%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1										
5.0 2.0 4.2. 01. 001 2	Sub Kegiatan : Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	48 Dokumen		NA	NA	NA	12 Dokumen	12 Dokumen	25%
5.0 2.0 4.2. 01. 001 3	Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	60 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	40%
5.0 2.0 4.2. 01. 001 4	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Laporan		NA	NA	NA	4 Laporan	4 Laporan	25%
5.0 2.0 4.2. 01. 001 5	Sub Kegiatan : Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	16 Laporan		NA	NA	NA	4 Laporan	4 Laporan	25%

2.3.4 Kondisi Lingkungan Dinamis

Selain mengacu pada dokumen perencanaan, penyusunan Renja Tahun 2027 juga mempertimbangkan berbagai perkembangan lingkungan strategis yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah, antara lain:

1. Perubahan kebijakan dan regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah serta pajak daerah yang menuntut penyesuaian kebijakan dan tata kelola pendapatan;
2. Penguatan tata kelola data perpajakan melalui pemanfaatan data lintas perangkat daerah dan instansi lain;
3. Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi, pengawasan berbasis risiko, dan pelayanan yang semakin mudah;
4. Peningkatan pemanfaatan digitalisasi perpajakan daerah, termasuk pembayaran non-tunai dan integrasi data;
5. Pertumbuhan investasi, pembangunan kawasan permukiman, serta aktivitas industri dan perdagangan di Kota Batam yang memengaruhi potensi pajak daerah;
6. Penguatan sinergi dan kolaborasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pendapatan daerah.

2.4 Telaah Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Batam yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tidak terdapat usulan maupun rekomendasi yang secara langsung menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program, kegiatan, maupun sub kegiatan.

Hal tersebut disebabkan karena tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam berfokus pada pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pengelolaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada umumnya lebih diarahkan pada usulan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan fisik, infrastruktur, serta urusan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tetap memperhatikan berbagai masukan, saran, dan rekomendasi DPRD yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah, penguatan tata kelola pendapatan daerah, serta upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

2.5 Inovasi Peningkatan Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam terus berupaya melakukan berbagai inovasi yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Inovasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, mendorong kepatuhan wajib pajak, serta mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peningkatan pelayanan publik dilaksanakan melalui pengembangan layanan berbasis digital, perluasan akses layanan perpajakan daerah,

serta pemberian stimulus. Inovasi sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. SIPOPA : Sinergi Pemungutan Opsen Pajak

SIPOPA (Sinergi Pemungutan Opsen Pajak) merupakan wadah koordinasi taktis dan kerja sama operasional lintas instansi antara Bapenda Kota Batam dengan Bapenda Provinsi Kepulauan Riau, Kepolisian, Denpom, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan PT Jasa Raharja dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Inovasi ini menyatukan berbagai aktor perpajakan terkait pajak kendaraan bermotor melalui empat pilar aksi, meliputi pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, razia gabungan, serta kolaborasi pelayanan jemput bola seperti penggabungan jadwal pelayanan Si Bijak Ngemall x Samsat Ngemall.

2. SIAGA : Sistem Antisipasi Gangguan Akses

SIAGA (Sistem Antisipasi Gangguan Akses) merupakan inovasi deteksi dini untuk memantau status aktif (online/offline) berbagai sistem Bapenda Kota Batam. Inovasi ini mentransformasi pengawasan pasif dan yang sebelumnya hanya menunggu laporan keluhan pengguna menjadi pemantauan proaktif melalui pengecekan otomatis ketersediaan layanan secara berkala, perekaman riwayat gangguan beserta timestamp dan kode HTTP, pengiriman notifikasi ke grup Telegram tim teknis saat sistem terdeteksi down, serta penyediaan dashboard terpusat untuk monitoring.

3. SIMPRESA : Sistem Presensi dan Sertifikat Acara

SIMPRESA (Sistem Presensi dan Sertifikat Acara) menghadirkan halaman acara (landing page) terpadu yang memudahkan peserta Sosialisasi atau Bimtek untuk mengakses seluruh kebutuhan kegiatan hanya dengan memindai QR Code melalui perangkat masing-masing. Platform digital ini menyatukan lima fitur utama dalam satu halaman web, yaitu pencatatan kehadiran yang praktis melalui Formulir Presensi Online, pemantauan data kehadiran secara transparan dan real-time pada Dashboard Presensi, kemudahan mengunduh bahan paparan di Tautan Materi, akses siaran langsung bagi peserta daring melalui Live Streaming, hingga fitur Unduh E-Sertifikat yang memungkinkan peserta mengunduh sertifikat kepesertaan mereka secara mandiri dan seketika.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029. Adapun tujuan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Batam adalah **“Meningkatkan Kemandirian Pembangunan Daerah”**.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
- 2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2027 mengacu pada Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Target Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah
Kota Batam Tahun 2027

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target
I	Meningkatkan Kemandirian Pembangunan Daerah	Derajat Fiskal Otonomi Daerah	53,64%
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Tingkat Pertumbuhan PAD;	6,92%
		2. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB.	0,775%
2	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batam	90,19

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi prioritas Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Secara umum, arah pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpijak pada **Visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"** yang dijabarkan ke dalam **8 Asta Cita** yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Asta Cita tersebut terdiri dari:

- 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa;
- 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur;
- 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia;
- 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi;
- 6. Membangun dari desa dan dari bawah;
- 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi;
- 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, budaya, dan toleransi.

Sementara dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2027 mengangkat tema pembangunan

“Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berkarakter, Didukung Pelayanan Publik yang Bermutu” dengan penjabaran ke dalam 3 (tiga) prioritas pembangunan diantaranya:

1. Pengembangan potensi ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. Pengembangan konektivitas antar wilayah dan pemertaan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana;
3. Pengembangan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu.

Dalam mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan provinsi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peran tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, mempercepat transformasi digital pelayanan publik, memperkuat reformasi birokrasi, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing. Optimalisasi pendapatan daerah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota Batam untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut terhadap arah kebijakan nasional tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam akan terus mengembangkan pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, digitalisasi sistem administrasi perpajakan, penguatan basis data perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan tata kelola pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya sasaran pembangunan nasional sekaligus mendukung peningkatan kapasitas fiskal dan pembangunan berkelanjutan di Kota Batam.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam pada perencanaan tahun 2027 merupakan tahun ke-3 dalam Renstra Tahun 2025-2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam untuk Tahun 2027 melaksanakan 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dengan 33 (tiga puluh tiga) jenis sub kegiatan dengan kebutuhan dana sebesar Rp 65.248.635.295. Adapun program dan kegiatan yang disusulkan adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

- a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - 2) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
 - 3) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
 - 5) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
 - 6) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
 - 7) Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - 8) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
 - 9) Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
 - 10) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah;
 - 11) Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
 - 12) Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah;
 - 13) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 14) Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			65.248.635.295							70.216.187.788				
5	02				KEUANGAN			65.248.635.295							70.216.187.788				
					BADAN PENDAPATAN DAERAH			65.248.635.295							70.216.187.788				
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD	78,57	74,57 Nilai	50.883.310.545							76,57	54.924.234.788	Badan Daerah	
						Indeks pelayanan kesekretariatan PD	92,70	92,00 Nilai								92,35		Badan Daerah	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu		100 Persentase	10.822.200							100	35.700.000	Badan Daerah	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	5.678.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Pemerintah Kota	2	22.500.000	Badan Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
												Nasional	Provinsi			Daerah				
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	5.144.200	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota	3	13.200.000	Badan Daerah	Pendapatan
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		100 Persentase	44.555.852.169							100	48.429.066.788	Badan Daerah	Pendapatan	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		210 Orang/bulan	44.465.734.169	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota	210	48.329.148.788	Badan Daerah	Pendapatan
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	90.118.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota	12	99.918.000	Badan Daerah	Pendapatan
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		100 Persentase	930.015.500							100	512.253.000	Badan Daerah	Pendapatan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif			
												Nasional	Provinsi							Daerah
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	210.126.000	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. M e m p e r k u a t P e m b a n g u n a n S u m b e r D a y a M a n u s i a (S D M), S a i n s, T e k n o l o g i, P e n d i d i k a n, K e s e h a t a n, P r e s t a s i O l a h r a g a, K e s e t a r a a n G e n d e r, s e r t a P e n g u a t a n P e r a n P e r e m p u a n, P e m u d a (G e n e r a s	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan S u m b e r d a y a m a n u s i a, r e f o r m a s i b i r o k r a s i d a n p e r l u a s a n p e m a n f a a t a n t e k n o l o g i i n f o r m a s i, s e r t a p e l e s t a r i a n b u d a y a m e l a y u	-Prioritas Kota B a t a m 4 . P e m e n u h a n d a n p e m e r a t a a n p e l a y a n a n p e n d i d i k a n d a n k e s e h a t a n b e r s k a l a g l o b a l d a l a m r a n g k a m e n c i p t a k a n k u a l i t a s S D M y a n g u n g g u l d a n b e r d a y a s a i n g		Pemerintah Kota	3	163.020.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		121 Orang	719.889.500	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan S u m b e r d a y a m a n u s i a, r e f o r m a s i b i r o k r a s i d a n p e r l u a s a n p e m a n f a a t a n t e k n o l o g i i n f o r m a s i, s e r t a p e l e s t a r i a n b u d a y a m e l a y u	-Prioritas Kota B a t a m 4 . P e m e n u h a n d a n p e m e r a t a a n p e l a y a n a n p e n d i d i k a n d a n k e s e h a t a n b e r s k a l a g l o b a l d a l a m r a n g k a m e n c i p t a k a n k u a l i t a s S D M y a n g u n g g u l d a n b e r d a y a s a i n g		Pemerintah Kota	65	349.233.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	P e r s e n t a s e P e m e n u h a n P e l a y a n a n U m u m P e r k a n t o r a n		1 0 0 P e r s e n t a s e	1.409.347.300						100	2.914.956.000	Badan Pendapatan Daerah			
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	26.213.400	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. M e m p e r k u a t P e m b a n g u n a n S u m b e r D a y a M a n u s i a (S D M), S a i n s, T e k n o l o g i, P e n d i d i k a n, K e s e h a t a n, P r e s t a s i O l a h r a g a, K e s e t a r a a n G e n d e r, s e r t a P e n g u a t a n P e r a n P e r e m p u a n, P e m u d a (G e n e r a s	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan S u m b e r d a y a m a n u s i a, r e f o r m a s i b i r o k r a s i d a n p e r l u a s a n p e m a n f a a t a n t e k n o l o g i i n f o r m a s i, s e r t a p e l e s t a r i a n b u d a y a m e l a y u	-Prioritas Kota B a t a m 4 . P e m e n u h a n d a n p e m e r a t a a n p e l a y a n a n p e n d i d i k a n d a n k e s e h a t a n b e r s k a l a g l o b a l d a l a m r a n g k a m e n c i p t a k a n k u a l i t a s S D M y a n g u n g g u l d a n b e r d a y a s a i n g		Pemerintah Kota	1	29.903.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		9 Paket	909.580.300	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. M e m p e r k u a t P e m b a n g u n a n S u m b e r D a y a M a n u s i a (S D M), S a i n s, T e k n o l o g i, P e n d i d i k a n, K e s e h a t a n, P r e s t a s i O l a h r a g a, K e s e t a r a a n G e n d e r, s e r t a P e n g u a t a n P e r a n P e r e m p u a n, P e m u d a (G e n e r a s	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan S u m b e r d a y a m a n u s i a, r e f o r m a s i b i r o k r a s i d a n p e r l u a s a n p e m a n f a a t a n t e k n o l o g i i n f o r m a s i, s e r t a p e l e s t a r i a n b u d a y a m e l a y u	-Prioritas Kota B a t a m 4 . P e m e n u h a n d a n p e m e r a t a a n p e l a y a n a n p e n d i d i k a n d a n k e s e h a t a n b e r s k a l a g l o b a l d a l a m r a n g k a m e n c i p t a k a n k u a l i t a s S D M y a n g u n g g u l d a n b e r d a y a s a i n g		Pemerintah Kota	9	1.010.747.000	Badan Pendapatan Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif			
												Nasional	Provinsi							Daerah
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	85.350.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota	4	834.052.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		1 Dokumen	4.013.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota	1	10.834.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	384.190.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota	12	1.029.420.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		100 Persentase	886.403.900							100	680.223.000	Badan Pendapatan Daerah		
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		80 Unit	400.724.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas		-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota	40	370.943.000	Badan Pendapatan Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif			
												Nasional	Provinsi							Daerah
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		45 Unit	485.679.100	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota	17	309.280.000	Badan Daerah	Pendapata n
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100 Persentase	914.452.076							100	748.261.000	Badan Daerah	Pendapatan	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	616.848.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota	12	746.004.000	Badan Daerah	Pendapata n
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	297.604.076	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota	12	2.257.000	Badan Daerah	Pendapata n
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		100 Persentase	2.176.417.400							100	1.603.775.000	Badan Daerah	Pendapatan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif			
												Nasional	Provinsi							Daerah
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	44.640.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikatif serta Mengembangkan Agromaritim	-Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	-Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		Pemerintah Kota	1	67.173.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		26 Unit	883.937.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota	25	957.473.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		275 Unit	261.744.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota	417	579.129.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit Unit	986.096.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota Batam	0	0	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih	10	10 Persentase	14.365.324.750								10	15.291.953.000	Badan Pendapatan Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif			
												Nasional	Provinsi							Daerah
						Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target	98	98 Persentase								98		Badan Pendapatan Daerah		
						Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah	10,76	13,55 Persentase								12,20		Badan Pendapatan Daerah		
						Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assesment	6,50	6,50 Persentase								6,50		Badan Pendapatan Daerah		
						Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assesment	6,50	6,50 Persentase								6,50		Badan Pendapatan Daerah		
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah official assesment		2,83 Persentase	14.365.324.750							2,84	15.291.953.000	Badan Pendapatan Daerah		
						Rasio Capaian Penagihan Piutang Pajak Daerah		100 Persentase								100		Badan Pendapatan Daerah		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah Yang Dihasilkan		4 Dokumen								4		Badan Pendapatan Daerah		
						Persentase Koordinasi dengan OPD Penghasil Retribusi		100 Persentase								100		Badan Pendapatan Daerah		
						Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah self assesment		1,03 Persentase								1,05		Badan Pendapatan Daerah		
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		1 Dokumen	116.510.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota dan Masyarakat	1	389.306.000	Badan Pendapatan Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
												Nasional							Provinsi	Daerah
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		1 Dokumen	435.290.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota dan Masyarakat	1	681.130.000	Badan Daerah Pendapatan	
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		5 Laporan	2.454.145.250	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota dan Masyarakat	14	2.645.036.000	Badan Daerah Pendapatan	
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		1000 Unit	6.000.000.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota dan Masyarakat	1000	6.000.000.000	Badan Daerah Pendapatan	
5	02	04	2.01	0005	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		12 Laporan	498.752.200	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota dan Masyarakat	12	830.819.000	Badan Daerah Pendapatan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif			
												Nasional	Provinsi							Daerah
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		10 Laporan	1.715.028.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota dan Masyarakat	10	1.797.859.000	Badan Daerah	Pendapata
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		10000 Obyek Pajak	652.890.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota dan Masyarakat	10000	1.099.288.000	Badan Daerah	Pendapatan
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		9 Layanan	70.560.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota dan Masyarakat	9	137.093.000	Badan Daerah	Pendapatan
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		17 Dokumen	236.163.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota dan Masyarakat	17	353.431.000	Badan Daerah	Pendapatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
												Nasional							Provinsi	Daerah
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		17 Dokumen	1.220.318.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota dan Masyarakat	17	662.769.000	Badan Daerah	Pendapatan
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		12 Dokumen	160.690.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota dan Masyarakat	12	133.100.000	Badan Daerah	Pendapatan
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		12 Dokumen	585.214.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota dan Masyarakat	12	320.038.000	Badan Daerah	Pendapatan
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		4 Laporan	38.422.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota dan Masyarakat	4	62.399.000	Badan Daerah	Pendapatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		4 Laporan	181.339.700	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generas	-Prioritas Provinsi 3. Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	-Prioritas Kota Batam 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing		Pemerintah Kota dan Masyarakat	4	179.685.000	Badan Daerah Pendapatan
					TOTAL:				65.248.635.295		70.216.187.788								

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kontribusinya terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi, pengendalian, dan penyempurnaan kebijakan serta program pembangunan di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Pencapaian IKU mencerminkan tingkat keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Capaian tersebut diperoleh melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan penerimaan pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan pengelolaan data perpajakan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain mengukur kinerja perangkat daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam juga berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui upaya peningkatan penerimaan daerah, penguatan tata kelola pendapatan, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan inovasi pelayanan perpajakan daerah.

Hasil pengukuran kinerja IKU dan kontribusi terhadap IKK menjadi bahan evaluasi dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam. Evaluasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan, penyusunan strategi, serta peningkatan kualitas perencanaan pada periode berikutnya guna mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Berikut capaian kinerja IKU dan IKK Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2025 beserta target tahun 2027.

Tabel 5.1

Kinerja IKU dan IKK Tahun 2025 dan Target Tahun 2027

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
1	Derajat Fiskal Otonomi Daerah		Persentase	54,36%	53,64%
2	Tingkat Pertumbuhan PAD		Persentase	27,39%	6,92%
3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		Persentase	0,756%	0,772%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batam		Poin	90,13	90,19
1		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	54,36%	53,64%

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam pada Tahun 2027 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2027 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya.

6.1 Catatan Penting

Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2027, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2027 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2027 terdiri atas 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2026, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2026.

6.2 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2027 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah

tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah.

2. Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2027 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2027 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, maka seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2027.

Demikian Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2027 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam pelayanan pendapatan daerah.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD